



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 58/HUMAS PMK/II/2023

Menko PMK: Pemetaan Daerah Rawan Bencana Penting

*Menko PMK Dampingi Presiden Buka Rakornas Penanggulangan Bencana 2023

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa koordinasi dan pemetaan daerah rawan bencana menjadi prioritas penting dalam rangka penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana dan Pameran Teknologi Kebencanaan tahun 2023 di JI Expo Convention Center Jakarta, pada Kamis (2/3).

“Kami akan menindaklanjuti identifikasi daerah yang rawan dengan bencana. Setiap daerah akan punya data terpusat dan terkoordinasi dengan BNPB serta Kemenko PMK, sehingga semua kebijakan akan sinkron dan dapat disesuaikan kebutuhannya di setiap daerah,” ujar Muhadjir.

Menko Muhadjir juga mengatakan bahwa kurikulum kebencanaan yang sudah berjalan di sekolah akan lebih ditingkatkan pelaksanaannya. Menurutnya, kurikulum menjadi bagian yang penting dari upaya mitigasi bencana.

“Kita akan meningkatkan fungsinya. Sehingga nanti kurikulum di sekolah tidak seragam seluruh Indonesia, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pentingnya penanganan bencana pada tahap awal yang mencakup perlunya peringatan dini, edukasi masyarakat, tata ruang dan konstruksi di wilayah potensi bencana, pengetatan pemberian izin dan konstruksi bangunan serta pemetaan daerah rawan bencana.

“Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana. Negara kita naik 81% frekuensi bencana alamnya dari tahun 2010, naik dari 1.945 menjadi 3.544 bencana,” ujar Jokowi.

“Siaga dan waspada menjadi kunci, tidak hanya pasca bencana, tetapi juga pra bencana yang jauh lebih penting, bagaimana menyiapkan masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pelatihan langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian,” imbuh Jokowi.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit, Gubernur beserta Bupati dan Walikota, Pangdam dan Kapolda, serta para mitra dan anggota BPBD seluruh Indonesia.

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk**

IG: kemenko_pmk